

**KEDUDUKAN KAUM WANITA DALAM DUNIA POLITIK JEPANG
SESUDAH RESTORASI MEIJI
HINGGA SETELAH PERANG DUNIA II**

**Skripsi Sarjana ini Diajukan sebagai
Salah Satu Persyaratan untuk Mencapai
Gelar Sarjana Sastra**

Oleh

AGNITA AYU WULANDARI

NIM : 98111005



PERPUSTAKAAN UNIV DARMA PERSADA	
No Induk	78/scr- FST/05-06
No Klas	305-40952-wul-k
Sabjek	WANITA - I.P.C
Asal	AGNITA A. W
Dan lain-lain	SKRIPSI FST
	31-1-06

**JURUSAN SASTRA JEPANG
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

JAKARTA

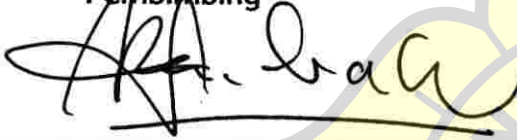
2003

Skripsi Sarjana yang berjudul :

KEDUDUKAN KAUM WANITA DALAM DUNIA POLITIK JEPANG SESUDAH
RESTORASI MEI HINGGA SETELAH PERANG DUNIA II

Telah diujikan pada tanggal 20 bulan Mei, tahun 2003 dihadapan Panitia
Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Sastra

Pembimbing



(Sandra Herlina S.S M.A.)

Ketua Penguji



(Dra. Yuliasih Ibrahim)

Penguji



(Dra. Tini Priantini)

Sekretaris Penguji



(Oke Diah Arini S.S)

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan Sastra Jepang .



(Dra. Yuliasih Ibrahim)

Dekan Fakultas Sastra Jepang



(Dra.Hj. Inny C. Hayono M.A.)

Skripsi Sarjana yang berjudul:

**KEDUDUKAN KAUM WANITA DALAM DUNIA POLITIK JEPANG SESUDAH
RESTORASI MEIJI HINGGA SETELAH PERANG DUNIA II**

Merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Ibu Sandra Herlina S.S, M.A, bukan merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya dan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta : pada tanggal 12 Mei 2003

Agnita Ayu Wulandari

Daftar Isi

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR

Bab I Pendahuluan

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Ruang lingkup Permasalahan.....	8
1.3	Tujuan Penulisan.....	8
1.4	Metode Penulisan.....	8
1.5	Sistematika Penulisan.....	9

Bab II Sekilas Sejarah Perjuangan Politik Wanita Jepang Sebelum Perang Dunia II

2.1	Wanita —wanita Pelopor Pergerakan Emansipasi Wanita di Jepang.....	11
2.1.1	Kishida Toshiko (1864-1901).....	12
2.1.2	K ageyama (Fukuda) Hideko (1865-1927).....	14
2.1.3	Shimizu (Kozai) Toyoko/Shikin (1868-1933).....	15
2.1.4	Ichikawa Fusae (1893-1981).....	16

2.2 Pria Pendukung Gerakan Emansipasi Wanita.....	18
---	----

Bab III Gerakan Politik Wanita Jepang Setelah Perang Dunia II

3.1 Perang Dunia II Pembuka Jalan Politik Bagi Wanita Jepang.....	22
3.1.1 Wanita Jepang Yang Terlibat Dalam Politik Pasca Perang Dunia II.....	23
3.1.2 Persiapan Menuju Pemilihan Umum Pertama Bagi Wanita Jepang.....	26
3.1.3 Pandangan Keliru Wanita Jepang Mengenai Demokrasi.....	28
3.2 Pemilihan Umum Pertama Setelah Perang Dunia II.....	29
3.2.1 Wanita Jepang Sebagai Kandidat Politik.....	29
1. Murashima Kiyo dari Niigata.....	31
2. Kato Shidzue.....	32
3. Kawasaki Natsu.....	33
3.2.2 Doi Takako Wanita Pertama Dalam Sejarah Jepang Sebagai Ketua Partai Politik.....	34

3.3 Hambatan-hambatan yang Dialami Oleh Wanita	
Jepang dalam Berpolitik.....	35
3.3.1 Diskriminasi Oleh Pria	
Pada Dunia Politik.....	35
3.3.2 Politikus Wanita Sebagai Objek.....	36
3.3.3 Pandangan Tradisional Mengenai Dunia Politik.....	38

Bab IV Kesimpulan.....	40
-------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Kedudukan wanita Jepang dalam bidang politik dari tahun 1945 hingga tahun 1990-an. Namun untuk mengetahui kedudukan wanita Jepang dalam dunia politik ini penulis juga memaparkan sekilas sejarah kedudukan wanita Jepang menurut catatan sejarah kuno. Karena ternyata dahulu kedudukan wanita Jepang sangatlah tinggi dan dihargai. Namun semuanya berubah ketika Jepang mengadopsi berbagai aturan pemerintahan dari Cina. Pemerintahan Jepang banyak menggunakan ajaran Konfusius sehingga secara perlahan kedudukan wanita Jepang berubah dan berada di bawah kedudukan pria.

Sejak restorasi Meiji banyak wanita Jepang yang mulai terlibat dalam gerakan-gerakan emansipasi menuntut persamaan hak dengan pria. Perjuangan mereka terus berlanjut hingga Perang Dunia II pecah. Akhirnya wanita Jepang mendapatkan haknya untuk berpolitik sama dengan pria setelah pendudukan sementara oleh sekutu.

Hambatan wanita Jepang untuk berpolitik tetap saja ada. Karena sejak dahulu dunia politik selalu menjadi dunia milik kaum pria Jepang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.T.W. karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik .

Skripsi ini berjudul *"KEDUDUKAN WANITA JEPANG DALAM DUNIA POLITIK JEPANG SESUDAH RESTORASI MEI HINGGA SETELAH PERANG DUNIA II"*. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menemui banyak hambatan akan tetapi berkat dukungan moral maupun materi serta doa dari orang-orang tercinta yang selalu ada dalam kehidupan penulis maka skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada:

1. Ibu Sandra Herlina, S.S., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah sangat membantu dan sabar terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih atas masukan-masukan ibu yang banyak menambah pengetahuan bagi penulis.
2. Ibu Dra. Tini Priantini, selaku Pembaca Skripsi.
3. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim, selaku Ketua sidang dan Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Dharma Persada sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis.
4. Ibu Oke Diah Arini S.S., selaku Sekretaris Penguji.

5. Ibu Dra. Inny C. Haryono, M.A., selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Dharma Persada.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Sastra Universitas Dharma Persada yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf Sekretariat Fakultas Sastra dan staf perpustakaan Universitas Dharma Persada.
8. Mama, Papa, Eyang, Ibu, Bapak, adik-adikku, Anggi dan Disti, sahabat-sahabatku, Lusi dan keluarga, Rina, Nita, Siska yang telah memberikan dukungan berupa semangat, dan doa.
9. Pada semua anak kelas B angkatan 98 Universitas Dharma Persada khususnya; Erma, Eriko, Berni, Euis, Yuni, Puti, Lala, Lili, Trie, Lisna, Kabul, Mery, Nilam dan Wilda yang selalu siap menghibur dikala penulis mengalami kebuntuan dalam berpikir.
10. Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian karya tulis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis meminta maaf. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari penulis sendiri sedangkan kebenaran datangnya hanya dari Allah S.W.T. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Jakarta, Mei 2003

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, Pakistan, Inggris dan Philipina adalah hal yang biasa bagi seorang wanita memegang posisi tertinggi dalam sebuah pemerintahan. Indonesia memiliki Megawati Soekarnoputri sebagai presiden, Pakistan pernah memiliki Benadzir Bhutto sebagai perdana menteri, Philipina pernah memiliki Corazon Aquino sebagai presiden dan kini negara ini memiliki Gloria M. Arroyo sebagai presiden yang juga seorang wanita. Inggris sendiri pernah memiliki Margareth Thathcer yang diberi julukan perdana menteri " tangan besi".

Penempatan mereka awalnya diwarnai dengan pro dan kontra karena wanita umumnya dianggap tidak mampu menjalankan tugas pemerintahan sebagai pemimpin negara yang selama ini didominasi oleh pria. Akan tetapi pada akhirnya mereka tetap ditempatkan dalam posisi pemerintahan yang tertinggi dengan pertimbangan yang adil. Bahwa wanita mampu memimpin sama baiknya dengan pria.

Wanita di dunia pada abad pertengahan sampai dengan permulaan abad ke-9 tidak mendapatkan kedudukan apa pun dalam kehidupan. Mereka

tidak memiliki hak yang layak untuk dilindungi oleh hukum dan undang-undang.

Kedudukan kaum wanita pada saat itu sama halnya dengan sebuah barang yang hanya dimiliki oleh kaum pria. Wanita dianggap sebagai pemuas nafsu dan alat untuk mendapatkan keturunan. Pendidikan kaum wanita pun terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan kerumahtanggaan seperti, mengurus rumah, memasak, menjahit dan mengasuh anak.¹

Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman, kini kaum wanita telah mengalami banyak perubahan. Wanita akhirnya mulai menyadari hak dan kewajiban mereka yang sebenarnya. Bahwa mereka mempunyai hak dan derajat yang sama dengan pria.

Wanita akhirnya menyadari bahwa mereka bisa memilih jalan hidup mereka yang mereka inginkan. Akibat dari kesadaran dari kaum wanita itu sendirilah akhirnya timbul keberanian mereka untuk mulai memperjuangkan nasibnya. Kesadaran itu memunculkan gerakan-gerakan wanita yang menuntut persamaan hak dan kewajiban antara wanita dan pria di berbagai belahan dunia termasuk di Jepang.

Ada sebuah legenda kuno Jepang yang tertulis di *Manyoshu* pada abad ke-7 di Jepang yaitu:

¹ Kedudukan Wanita di Mata Hukum, Victor Situmorang, S.H. PT Bina Aksara, Jakarta 1998. Hal 9

*Our great Sovereign who rules in peace,
Offspring of the Bright One on high
Wills, as a goddess, to rule her dominion
And to decree her towering Palace
On the plain of Fujiwara.
-Manyoshu, seventh century²*

Arti: pemimpin kami yang agung yang memimpin dalam kedamaian
Titisan dari cahaya di angkasa
Wasiat, sebagai dewi, untuk memerintah wilayahnya
Dan untuk membuat perintah pada
Keluarga Fujiwara

Legenda ini menyatakan bahwa Keluarga Kerajaan Jepang adalah anugerah dari Dewi Matahari yaitu *Dewi Amaterasu Omikami*. Legenda ini mengatakan bahwa Dewi Amaterasu dahulu kala mengutus cucu laki-laknya *Ninigi-no-Mikoto* untuk turun dari surga ke Kepulauan Jepang membawa tiga benda keramat yaitu cermin, pedang dan permata semua itu dimaksudkan untuk memerintah dan membawa kesejahteraan bagi manusia di bumi.³

La'lu pada abad 220 SM-265 SM di Jaman *Dinasti Wei* menurut riwayat/babad Cina *Wei Chih Wo Fen Chuan* kedudukan wanita di Jepang adalah sebagai penguasa. Bahkan orang-orang Cina Dinasti Wei yang pernah berkunjung ke Jepang, menyebut Jepang sebagai *Negara Ratu* dan mereka sangat terkesan dengan kepemimpinannya. Pemimpin negaranya adalah *Ratu Himiko* (Puteri Matahari).

Yamatai-koku adalah negara yang dipimpin oleh Ratu Himiko. Negara ini memiliki lebih dari tiga puluh wilayah di seluruh Jepang. Ratu Himiko tinggal di sebuah istana yang dijaga oleh 1000 orang wanita. Selain Ratu Himiko, selama periode Asuka (552-710) hingga Nara (710-784) ada

² The Hidden Sun: Women of Modern Japan. Dorothy Robins-Mowry. Hal 2

³ ibid

dua orang wanita Jepang yang pernah menjadi pemimpin yaitu *Ratu Suiko* (592-628) dan *Ratu Jito* (687-697).⁴

Dari gambaran mengenai adanya dewa wanita dalam mitos dan banyaknya jumlah wanita yang pernah memegang tampuk kekuasaan antara abad ke-6 dan ke-7, dapat disimpulkan bahwa Jepang pada saat itu menganut sistem matriakal.⁵

Namun menurut Undang-undang Taiho tahun 702 dan dalam versi revisinya, Undang-undang Yoro tahun 718 berdasarkan pada ajaran Konfusius, pemerintah Nara menghapus warisan sistem matriakal dari organisasi klan Jepang. Mereka membentuk sistem patriakal yang menyerukan penaklukan pada wanita sesuai tata ajaran Konfusius dan diskriminasi terhadap wanita dalam hal kepemilikan pernikahan dan perceraian. Sebuah landasan yang kuat telah dibangun untuk menghilangkan kekuasaan wanita telah dibangun. Secara perlahan sistem yang diadopsi dari Cina ini merubah sistem sosial dan politik Jepang.

Meskipun wanita kehilangan kekuatannya untuk mencapai tahta, pada periode Kamakura (1185-1333) mereka masih memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Seperti hak memberikan suara dalam kebijakan pemerintahan secara tidak langsung melalui kaum pria.

⁴ Women in Changing Japan, Joyce Lebra. Westview Press 1976. Hal 3-4

⁵ The hidden Sun: Women of Modern Japan, Dorothy Robins-Mowry. Hal 9

Pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa kedudukan wanita di Jepang berada di bawah kendali orang tua yang kemudian akan dialihkan kepada orang yang akan menjadi suaminya kelak. Ajaran ini berasal dari ajaran Konfusius 500 M. Ajarannya yaitu:

*Man and women should never sit in the same apartment after they reach seven years of age.*⁶

Artinya: pria dan wanita tidak boleh duduk di ruangan yang sama pada saat mereka telah berusia tujuh tahun.

Karena ajaran tersebut posisi wanita di Jepang dianggap lemah. Mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri melainkan untuk orang tua kemudian untuk suami dan keluarga suaminya. Bahkan disaat suaminya meninggal wanita harus mengabdikan hidup pada anak lelakinya itu.

Wanita Jepang pada masa Tokugawa tidak memiliki jalan untuk ikut aktif dalam politik. Mereka umumnya dilibatkan pada perkawinan politik atau terkadang sebagai jaminan antara dua keluarga yang berpengaruh dalam membentuk persekutuan kekuatan.

Kedudukan wanita Jepang mulai menampakkan perubahan pada Jaman Meiji setelah Pemerintahan *Shogun Tokugawa* berakhir. Pada tahun 1868 pemerintah Jepang menjalankan politik *Aikoku* setelah mereka menutup diri selama lebih dari 300 tahun lamanya.

⁶ Wisdom of The East: The Way of Contentment, John Murray. Al BE Marle Street w 1913. hal 14.

Pemerintah Meiji mulai membuka kesempatan belajar bagi wanita mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Masa ini disebut juga dengan masa *Bunmei Kaika* (Masa Pencerahan).⁷

Pada tahun 1874 Perguruan tinggi khusus wanita didirikan dengan nama *Ocha no Mizu*, dengan tujuan utama memberikan pendidikan bagi wanita Jepang. Kurikulum yang digunakan adalah perpaduan antara kurikulum Barat dan tradisional. Materi yang diajarkan selain pelajaran sekolah umumnya seperti matematika dan bahasa Inggris adalah mencuci, memasak dan lain-lain. Sekolah ini bertujuan menghasilkan istri-istri yang baik sehingga kelak mereka bisa menjadi ibu yang bijaksana dalam mengurus keluarga. Dari sini terlihat dengan sangat jelas ketidakadilan kualitas pendidikan yang diberikan antara pria dan wanita Jepang pada saat itu.

Dari tahun 1868 sampai dengan sebelum Perang Dunia ke II, yaitu pada tahun 1945 wanita Jepang masih mengusahakan untuk mendapatkan persamaan hak dan kewajiban dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan pendidikan. Salah satu pelopor dalam bidang sosial dan politik adalah *Ichikawa Fusae* dan *Ishimoto Shizue (Katoo)*, pelopor dalam ekonomi bidang adalah *Oku Mumeo* dan pelopor dalam dunia pendidikan adalah *Tsuda Umeko*.

⁷ The Hidden Sun, ibid hal xxi

Nama Tsuda Umeko kini diabadikan untuk sebuah universitas yang dirintisnya bersama teman-temannya yaitu *Tsuda Jyuku Daigaku* dan menjadi salah satu universitas terbaik di Jepang saat ini.⁸

Meskipun dalam bidang pendidikan, wanita Jepang sudah mulai mendapatkan persamaan hak dan kewajibannya, tetapi dalam bidang politik wanita Jepang belum mendapatkan haknya untuk berpolitik sampai setelah perang dunia ke-2. Sebelumnya wanita Jepang tidak bisa ikut dalam pemilihan umum, karena syarat untuk mengikuti pemilihan umum sebelum tahun 1945 haruslah seorang pria.⁹

Pada tahun 1946 kehidupan wanita Jepang dalam dunia politik mulai berubah, karena untuk pertama kalinya kaum wanita Jepang mempergunakan hak mereka dalam bidang politik. Wanita Jepang memberikan hak suara mereka dalam pemilihan umum pada tanggal 10 April 1946. Suara wanita Jepang mulai diperhitungkan pada saat itu sebagai pemilih dan kandidat politik untuk dipilih.¹⁰

⁸ ibid

⁹ Belajar dari Jepang, Manusia dan masyarakat Jepang dalam perjuangan hidup, Sayidiman Suryohadiprojo. UI press 1987. Hal 4

¹⁰ Peranan Wanita Jepang, Okamura Masu, terj. Emy Kuntjoro-Jakti. Gajah Mada UGM Press. Hal 4

1.2 Ruang Lingkup Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa kedudukan wanita Jepang selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan politik dan penguasa. Dalam skripsi ini yang akan dijadikan permasalahan adalah bagaimana perubahan kedudukan wanita Jepang dalam dunia politik pasca Perang Dunia II, yaitu sejak tahun 1945 hingga tahun 1990an.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembahasan masalah ini adalah untuk melihat kedudukan wanita Jepang dalam dunia politik pasca Perang Dunia II, yaitu sejak tahun 1945 hingga tahun 1990-an seiring dengan perkembangan jaman.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskripsi analisis yang berdasarkan pada data kepustakaan. Penulis mencari data dan keterangan dari buku-buku yang tersedia di Perpustakaan UNSADA, pusat bahasa dan kebudayaan Jepang dan perpustakaan Soemantri Bojonegoro.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

pada bab ini penulis akan mencoba menerangkan mengenai latar belakang, ruang lingkup permasalahan, metode penulisan yang digunakan oleh penulis, sumber-sumber data yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab II Sekilas Gerakan Politik Wanita Jepang Sebelum Tahun 1945.

pada bab ini penulis akan mengulas sedikit mengenai tokoh-tokoh wanita Jepang yang berjuang dalam bidang politik sebelum terjadi Perang Dunia II pada tahun 1945.

Bab III Gerakan Politik Wanita Jepang setelah Perang Dunia II

Bab ini penulis akan membahas perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai oleh perjuangan gerakan politik yang dilakukan oleh wanita Jepang setelah tahun 1945 hingga tahun 1990-an.

Bab IV Kesimpulan.

Pada bab ini penulis mencoba menyimpulkan mengenai uraian-uraian yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.

